

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Nahdlatul Ulama' (NU) di dirikan di Surabaya pada tahun 1926 dengan sebuah pola dasar perjuangan yang lazim dikenal dengan Khittah 1926. Pada awal berdirinya NU bukan merupakan partai atau organisasi politik, melainkan sebuah jami'yah diniyah atau organisasi (sosial-) keagamaan. Namun walaupun bukan merupakan organisasi politik, dimensi politik dalam aktifitas NU tidak kecil, terutama sekali karena dalam tujuan pendiriannya sejak awal telah terkandung muatan-muatan politik, yaitu penggalangan nasionalisme di tengah iklim kolonial saat itu.¹

Setelah beberapa tahun bergerak semata-mata dalam kegiatan sosial keagamaan, bergabungnya NU ke dalam MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) menandai mulai manifesnya orientasi politik organisasi ini. Dalam MIAI, NU turut aktif bersama GAPI (Gabungan Pilitik Indonesia) menyuarakan tuntutan Indonesia untuk berparlemen.² MIAI, setelah

¹Lihat Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama (Sala: Jatayu, 1985), h. 24-33. Lihat juga pada Manfred Zimek, Pesantren dalam Perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1986), h. 64-65.

²Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 289-290.

melakukan tahapan-tahapan perkembangan metamorfosis, merupakan cikal bakal partai Masyumi dimana NU turut bergabung dan menyalurkan aspirasi politiknya di masa kemerdekaan.

Tahun 1952, NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik tersendiri, menyusul munculnya serangkaian kekecewaan NU terhadap Masyumi yang berkaitan dengan masalah distribusi kekuasaan yang ada dalam struktur pimpinan partai federal ini.³

Keluarnya NU dari Masyumi memungkinkan organisasi "bintang sembilan" ini untuk lebih mengaktualisasikan diri. Prestasi spektakulernya yang pertama diukir dalam pemilu 1955, walau dengan masa persiapan yang lebih singkat dibandingkan partai politik lain, NU ternyata mampu menempati peringkat ketiga perolehan suara setelah FNI dan Masyumi. NU meraih 18,4 % suara dan 45 kursi diparlemen.⁴

Dua tahun setelah pemilu 1971, dilakukan penyederhanaan kepartaian di Indonesia. 9 partai politik

³Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional (Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti, 1987) h, 80-86.

⁴Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca; Cornell University Press, 1962), Tabel 2, h. 434 F., sebagaimana dikutip oleh Martin van Bruinessen, Traditionalist Muslim in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Islamics, Fictional conflict, and The Search for a New Discourse (manuskrip) terj. Wahid Wajidi: NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (Jogjakarta; LKiS Cet. I, 1994).

yang ada disederhanakan sehingga hanya menjadi dua partai politik saja, di samping Golkar. NU, bersama Parmusi, PSII, Perti, bergabung dengan PPP. Sementara PNI, IPKI, Murba, Partai Katholik dan Perkindo, berfusi dalam PDI.⁵ Baik PPP maupun PDI sebenarnya merupakan buah dari fusi yang tidak pernah tuntas. PDI misalnya, partai ini tersusun dari unsur-unsur yang masing-masing memiliki asas yang berlainan: nasionalis, sosialis, katholik, dan kristen. Benang merah yang menyatukan keaneka-ragaman asas itu, sebenarnya rapuh dan mustahil dapat terikatkan tanpa adanya rekayasa pemerintah. Begitu pula PPP. Sekalipun semua unsur berasaskan Islam, tapi masing-masing memandang dan mempersepsikan asas itu dalam visi yang berbeda. Setidaknya, terdapat dua aliran pemikiran utama dalam PPP, yaitu kelompok modernis yang secara longgar terdapat dalam MI dan SI, serta kelompok tradisional dalam NU dan Perti.⁶

Fusi yang tidak tuntas ini menyebabkan perkembangan kedua partai tersebut selalu diwarnai oleh konflik internal antar unsur yang seakan tidak pernah usai. Bahkan, Kwik

⁵M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-surut (Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 170.

⁶Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru (Jakarta: PT. Grasindo, 1991), h. 9.

Kian Gie, yang pernah duduk dalam partai PDI, dalam otokritiknya menyayangkan kiprah partai banteng ini yang tampak seperti partai kampung yang bisanya cuma berkonflik.⁷ Sementara dalam PPP, konflik internal tampak berpola sebagai pertentangan antara kalangan modernis dan kalangan tradisional, terutama antara MI dan NU. Pada mulanya konflik itu memang relatif laten, namun memasuki era 1980-an, konflik MI-NU kian manifes, yang antara lain menyangkut kedudukan dalam partai dan DPR. Sementara campurtangan pemerintah dalam konflik internal itu semakin menguatkan MI vis a vis NU, maka kronologis keluarnya NU dari Masyumi seolah terulang lagi. NU yang memendam kekecewaan terhadap PPP, mulai menjelang pemilu 1982 telah mengancam akan keluar dari partai itu. Ancaman ini kemudian ternyata tidak main-main.

Sementara itu, Munas 'Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983 membuahkan keputusan yang mengejutkan, yakni bahwa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal, mendahului keputusan organisasi massa manapun.⁸ Keputusan tersebut ditegaskan kembali dalam Mukhtamar NU ke-27 tahun

⁷ Seperti di gambarkan oleh Arbi Sanit; Partai, Pemilu dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

⁸ Mengenai penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal oleh NU, lihat Einar Sitompul, NU dan Pancasila (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), h. 160-187.

berikutnya di kota yang sama. Muktamar ini merupakan titik balik sejarah NU, sebab di sini dilahirkan keputusan penting NU untuk kembali ke Khittah 1926.⁹ Salah satu makna dan konsekuensi yang dibawa dalam keputusan ini adalah bahwa NU tidak lagi terikat dalam PPP. Terlebih dengan diputuskannya kemudian tentang pelarangan perangkapan jabatan antara pengurus NU dengan pengurus Orpol, termasuk PPP, khususnya pengurus harian. Keluarnya NU dari PPP kemudian disusul oleh aksi "penggembosan" NU terhadap PPP menjelang Pemilu 1987. Dalam Pemilu ini PPP mengalami kemerosotan perolehan suara yang sangat drastis dibanding Pemilu sebelumnya.¹⁰ Untuk menyimpulkan bahwa kemerosotan perolehan suara PPP disebabkan oleh aksi penggembosan NU barangkali terlalu tergesa-gesa. Tapi bahwasanya fenomena yang disebut pertama muncul setelah adanya fenomena yang disebut belakangan, jelas tidak dapat dipungkiri.

Kembali kepada produk Muktamar 1984, dalam keputusan kembali kepada khittah 1926 pada umumnya dipandang terdapat makna bahwa NU memutuskan untuk tidak lagi berpolitik. Konsekwensinya adalah

⁹Tentang kronologis lahirnya keputusan penting kembali ke khittah 1926, lihat antara lain, Kacung' Marijan, Quo Vadis NU setelah kembali ke Khittah 1926 (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 110-156.

¹⁰Lihat Haris, *Op. cit.*, Tabel 4, h. 121.

....adanya pemisahan tegas antara kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan nonpolitik. Dan NU ingin mencurahkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan nonpolitik (praktis) sosial keagamaan, sebagaimana semangat tahun 1926.¹¹

Akan tetapi kemudian: Benarkah NU mampu memusatkan perhatian dan mengarahkan aktifitas-aktifitasnya semata-mata di bidang sosial keagamaan dan sama sekali memalingkan muka dari aktifitas politik? Kenyataan yang teramati memberikan jawaban negasi bagi kenyataan tersebut.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan sebelum menapaki kenyataan yang ada itu lebih jauh. Pertama, sebagaimana juga disebutkan pada beberapa paragraf di muka, dalam tujuan pendirian NU sejak awalpun telah terkandung muatan-muatan politik. Kalaupun gerakan NU pada tahap-tahap awalnya tidak menonjolkan orientasi politiknya, itu hanya soal waktu. Ketika orientasi politik yang embrional itu mulai meronta dan menuntut agar dirinya segera dilahirkan dalam tindakan-tindakan riil dan tidak hanya tersimpan laten, maka bentuk organisasional NU yang waktu itu masih murni jam'iyah diniyah tidak kuasa membendunginya. Bentuk organisasilah yang kemudian menyesuaikan diri dengan orientasi gerakan NU, dan bukan sebaliknya. Dalam catatan tentang fenomena tentang keluarnya NU dari Masyumi untuk

¹¹Kacung Marijan, Respons NU terhadap Pembangunan Politik Orde Baru, dalam Jurnal Ilmu Politik No. 9, h. 53.

berdiri sebagai Parpol tersendiri, adalah tindakan adaptasi terhadap orientasi politik yang kian kasat mata itu sekedar merupakan perluasan wawasan yang harus dimainkan dalam rangka mencapai tujuan (awal) keorganisasiannya, yaitu menegakkan Syariat Islam secara murni berdasarkan paham **Ahlu Sunnah wal Jama'ah** yang dianutnya. Penilaian ini cukup beralasan, sebab pada dasarnya bagi NU, fungsi organisasi hanyalah sekedar alat untuk mencapai tujuan. Ini berarti, bentuk organisasi semata-mata bukanlah merupakan tujuan, apalagi tujuan akhir.¹² Apapun bentuk organisasi yang disandang NU dalam kala tertentu, hal itu terutama sekali haruslah dipandang sebagai adaptasi diri terhadap konteks, yaitu setiap saat sangat dimungkinkan untuk berubah sepanjang usaha pencapaian yang terkandung dalam nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jama'ah menghendaki begitu. Jadi, terlalu tergesa-gesa untuk mengestimasi bahwa berubahnya bentuk organisasi NU ke wujud organisasi sosial-keagamaan serta merta akan melunturkan orientasi politiknya, betapapun secara formal telah ditetapkan untuk tidak lagi berpolitik (praktis).

Kedua, politik tampaknya terlanjur menjadi sebuah

¹²Nilai ini tersirat, misalnya, dalam ungkapan seorang tokoh NU, KH. Wahid Zaini: "kalau organisasi NU bubar, NU --secara kultural-- masih ada". Lihat Marijan, Quo Vadis, Op. Cit., h. 190.

elan bagi NU, yang telah terasah tajam sepanjang pergulatannya secara langsung dalam politik praktis selama kurun waktu tidak kurang dari 32 tahun (1952-1984). Karena itu, mustahil untuk memaksa NU sepenuhnya meninggalkan arena politik dan diam menjadi penonton yang pasif. Hal itu tentu saja disadari oleh para elit NU, termasuk mereka yang menandatangani keputusan untuk kembali ke Khittah 1926. Tampaknya dilandasi oleh kesadaran inilah, maka pada konsideran keputusan Munas Alim Ulama NU no. II/MAUNU/1404/1983: Tentang Pemulihan Khittah NU 1926, yang kemudian dikukuhkan dengan keputusan Mukhtar NU no. 01/MNU-27/1984, antara lain disebutkan bahwa :

Dalam kurun waktu yang cukup lama, secara tidak disadari Nahdlatul Ulama telah menjadi kurang peka dalam menanggapi perkembangan keadaan, khususnya yang menyangkut kepentingan umat dan bangsanya. Salah satu sebab ialah keterlibatan yang berlebihan dalam kegiatan politik praktis ...¹³

Pemakaian kata "berlebihan" dalam konsideran di atas tentu bukannya tanpa makna. Agaknya yang dimaksud dengan "pemulihan Khittah 1926" bukanlah sama sekali turun dari pentas politik, melainkan meminimalkan keterlibatan yang berlebih-lebihan dalam politik itu, yang menyebabkan tokoh-tokoh NU akhirnya hanya memikirkan kepentingan dan ambisi

¹³Lihat Sitompul, *Op. Cit.*, Lampiran 2, h. 209. Cetakan miring dari penyusun.

politik pribadinya saja, sementara kepentingan umat/warga NU terabaikan. Keterlibatan dalam politik dengan demikian tetap ditelorir, sejauh tidak berlebihan, dan didedikasikan kepada "kepentingan umat dan bangsanya".

Nampaknya hampir tidak ada, atau sedikit sekali, kalangan ulama/kiai NU yang berpandangan demikian. Tidak kalah cerobohnya adalah kebanyakan pengamat yang sertamerta menafsirkan bahwa dengan kembali kepada Khittah 1926 NU akan meninggalkan gelanggang politik sama sekali. Sementara kelompok politisi NU ternyata masih menginginkan kepolitikan praktis bagi NU. Salah seorang tokoh yang cukup vokal dalam hal ini adalah Mahbub Djunaedi, salah seorang ketua PB Tanfidziyah NU periode 1984-1989 dan anggota Mustasyar periode 1989-1994. Menjelang Munas Alim Ulama NU tahun 1987, Mahbub melontarkan gagasan agar NU kembali berpolitik praktis, walaupun telah menyatakan diri kembali ke Khittah 1926. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai "khittah plus".¹⁴ Menurutny, dengan jumlah massa yang begitu besar, tidak semestinya NU hanya berdiam pasif di luar pagar arena politik dan hanya berfungsi sebagai pemberi suara saja. Ia bahkan memberikan usulan yang sulit terealisasi agar NU kembali menjadi partai politik. Dalam

¹⁴Mahbub Djunaedi, "Khittah Plus", Tempo 7 Nopember 1987.

keyakinannya, jika warga NU ditanya satu per satu, masih banyak yang menginginkan NU jadi Parpol "jika keadaan memungkinkan".¹⁵ Satu hambatan besar besar bagi gagasan Mahbub itu adalah bahwa keadaan sama sekali tidak memungkinkan. Menjadikan NU sebagai Parpol adalah sangat mustahil, sebab itu akan berbenturan dengan peraturan perundangan yang ada.

Seorang tokoh lain, Nuddin Lubis, mantan Wakil Ketua DPR-RI, memiliki pandangan lebih rasional dan pragmatis, sebab ia tidak sampai mengusulkan agar NU kembali menjadi Parpol.¹⁶ Landasan pemikiran Lubis adalah serupa dengan Mahbub, besarnya jumlah massa yang berada di bawah naungan NU. Menurutnya, peran politik NU adalah :

.....suatu kewajiban sekaligus konsekuensi yang harus dimainkan oleh NU untuk menyalurkan aspirasi politik warganya yang jumlahnya mencapai puluhan juta orang (itu).¹⁷

¹⁵Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Arief Afandi di Jawa Timur sedikit banyak mendukung keyakinan Mahbub ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa "hampir separo dari pemimpin NU di wilayah penelitian tersebut masih cenderung memiliki orientasi yang berbobot politik daripada nonpolitik". Lihat Arief Afandi, "NU: Transformasi yang Belum Usai", Jawa Pos, 9 Juni 1993.

¹⁶Lihat Nuddin Lubis, Jangan Berlarut-larut Warga NU Mengambang, dalam S. Sinansari Ecip (ed.), *Op. Cit.*, h. 37-46.

¹⁷*Ibid.*, h. 37.

Lubis secara implisit menyarankan agar NU kembali memiliki ikatan dengan salah satu Orpol sebagai saluran resmi aspirasi politik warganya. Keadaan NU yang mengambang saat ini jelas tidak menguntungkan warganya. Demikian pula jika dilihat dari kaca mata objektif bahwa hal itu berarti potensi jutaan sumber daya insani yang terwadahi dalam NU tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan negara, bangsa, dan pemerintah. Khittah 1926 sendiri perlu dikaji secara mendalam dan dirinci lebih jelas agar warga NU dapat memahaminya. Lubis yakin bahwa Khittah 1926 sebagai garis perjuangannya, organisasi ini telah terus-menerus terlihat dalam politik praktis.

Keinginan untuk tetap berpolitik, dengan segala variannya itu, akhirnya memang mesti berbenturan dengan pandangan umum kebanyakan para ulama NU yang memiliki penafsiran sendiri tentang khittah. Mereka tetap bersikukuh dalam klaim bahwa kembali ke Khittah 1926 berarti NU tidak lagi berpolitik.

Namun klaim itu tampaknya tetap tinggal jadi klaim saja. Orientasi politik NU ternyata tidak pernah surut, dan warna politik dalam kiprah NU tampaknya tidak pernah pudar. Salah satu event monumental yang membuktikan hal itu adalah dilangsungkannya Rapat Akbar NU menjelang pelaksanaan Pemilu 1992 yang berhasil menghimpun ratusan ribu warga NU. Dilihat dari jumlah keseluruhan warganya yang puluhan juta

orang, angka ratusan ribu yang terhimpun itu memang kecil. Tapi jika dilihat bahwa rapat akbar itu dilaksanakan tepat pada hari pertama pelarangan yang ditetapkan Mendagri untuk mengadakan pertemuan-pertemuan umum karena sudah mendekati Pemilu,¹⁸ angka di atas jadi berbicara lain.

Rapat Akbar NU 1992, yang meskipun disangkal sebagai politik praktis namun oleh Sekjen PB NU Ichwan Syam diakui sebagai sebuah langkah politik,¹⁹ tentu mengagetkan banyak pengamat yang telah terlanjur mapan dalam kesimpulan bahwa kembali ke khittah berarti surutnya kepolitikan NU. Mozaik NU pasca 1984 memang tampak rumit. Warna-warni yang kian beraneka-ragam yang muncul dalam aktifitas-aktifitasnya dapat menyilaukan mata para pengamat, jika mereka tidak berdiri dalam sudut pandang yang tepat serta dengan kacamata yang tepat pula dalam menganalisis NU. Seorang pengamat asing, Adree Feillard,²⁰ menyadari betul hal itu. Penilaiannya tentang NU dikutip agak panjang disini:

NU telah memilih untuk melaksanakan hijrah dengan caranya sendiri, dalam suatu bentuk yang lunak. Yaitu: meninggalkan pertarungan kekuatan dalam PPP, dan memusatkan diri dalam upaya membangun kembali (konsolidasi) kekuatannya yang telah sangat melemah setelah bertahun-tahun bertarung dengan pemerintah,

¹⁸ Editor No. 25, 7 Maret 1992, h. 13.

¹⁹ Ibid., h. 16.

²⁰ Andree Feillard, Isyarat Politik setelah Situbondo, dalam Ibid., h. 30-31.

namun tetap memasuki sistem yang ada sekarang. Ketimbang meminta PPP untuk bertarung untuk kepentingannya, NU mencoba mempertahankan kepentingannya lewat siapa saja yang menawarkan diri: bisa jadi itu Golkar, tapi sering pula melalui presiden sendiri. NU tahu bahwa DPR, yang meniru parlemen ala Barat, telah kehilangan pengaruhnya dalam lobi politik, sebagaimana kebanyakan kasus di negara-negara Dunia Ketiga. NU setengahnya menolak sistem ini, tetapi juga mengeksploitasinya dengan lebih cerdik lagi. Ambiguitas ini tampak dalam semua langkah yang diambil NU: bahkan sejak Situbondo (kembali ke khittah), dan akan selalu mewarnai pertanyaan yang berkisar seputar khittah.²¹

Pada bagian lain tulisannya, Feillard juga mengingatkan bahwa pada saat ini,

NU mungkin bukan suatu gerakan politik ... tetapi ia tetap suatu kekuatan politik. Dengan demikian, ia tidak bisa menjauh dari politik sama sekali.²²

Jika asumsi Feillard ini dapat disetujui, dan tampaknya memang demikian, maka agenda NU adalah mencari model kepolitikan yang tepat dalam kapasitasnya saat ini. Pada era sebelum 1984, ketika NU masih berupa partai politik maupun ketika bergabung dengan PPP, model kepolitikan itu cukup jelas dan tidak terlalu menjadi persoalan. Lepas dari masalah efektifitas, kepentingan dan aspirasi politik warganya dapat secara langsung tersalurkan melalui badan legislatif di mana NU jelas memerlukan suatu formulasi baru. Dan ini bukan merupakan persoalan yang

²¹ Ibid., h. 32.

²² Ibid.

dapat dikatakan mudah, mengingat masih ada perbedaan pendapat di kalangan elit NU sendiri akan makna kembali ke khittah itu dalam implikasi politiknya.

B. ALASAN MEMILIH JUDUL

Yang menjadi alasan penyusun memilih judul diatas adalah :

Objektif

1. NU sebagai aset bangsa, telah memberikan kontribusi terhadap eksistensi bangsa Indonesia.
2. Visi dan orientasi NU sebelum dan setelah Khittah 1926, turut mewarnai perjalanan sejarah negeri ini.
3. Adanya dinamika eksternal dan internal NU dengan keputusan kembali ke Khittah 1926.

Subjektif

1. Tidak keluarnya bahasan di atas dari *frame* disiplin ilmu yang sedang penyusun geluti.
2. Keterpanggilan moral penulis terhadap fenomena NU.
3. Belum adanya bahasan sesuai dengan judul di atas.

C. PENEGASAN JUDUL

Untuk menjaga agar tidak adanya kesimpang-siuran dalam memahami pengertian dari judul skripsi ini, maka penyusun akan memberikan penjelasan tentang judul diatas. Adapun judul skripsi ini adalah: **DINAMIKA NAHDLATUL ULAMA**

(NU) 1984-1995, *Sebuah Perspektif Khittah 1926*. Sedangkan penegasan judul tersebut, sebagai berikut;

Dinamika : Gerak masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat.²³

Nahdlatul Ulama: Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab **Nahdlah**, berarti bangkit atau bergerak, dan **Ulama** jama' dari kata tunggal **Alim**, berarti: yang mengetahui atau yang berilmu. Kata Nahdlah kemudian disandarkan pada Ulama menjadi Nahdlatul Ulama yang berarti Kebangkitan Ulama' atau pergerakan Ulama. Menurut Mas Almi, pengertian Nahdlatul Ulama lebih cenderung kepada: "gerakan serentak para ulama dalam suatu pengarahan, atau, gerakan bersama-sama yang terorganisasi."²⁴

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 1990) h. 206.

²⁴Lihat pada Aula, No. 2, Th. III, 1981 dan juga bandingkan dengan Abdul wahab Turhan, *Dipilihnya Nama NU*, dalam Hasyim Latief, NU Penegak Panji Ahlussunnah wal Jamaah (PW. NU Jatim., 1979), h. 42.

Khittah 1926 : Khittah artinya garis lurus. Dalam hubungannya dengan Nahdlatul Ulama, kata Khittah berarti garis pendirian, perjuangan dan kepribadian Nahdlatul Ulama, baik yang berhubungan dengan urusan keagamaan, maupun urusan kemasyarakatan, baik secara perorangan maupun secara organisasi. Fungsi garis itu dirumuskan sebagai "landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan". Artinya: a) Pikiran, sikap dan tindakan warga NU harus berlandaskan atas Khittah NU, baik secara perorangan maupun secara organisatoris kolektif. b) Demikian pula, setiap kali mengambil keputusan, maka proses, prosedur dan hasil keputusan itu harus sesuai dengan Khittah NU.²⁵

²⁵KH. Ahmad Siddiq, Penjelasan Khittah Nahdlatul Ulama, makalah. Makalah tersebut dipresentasikan pada Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 1983, dan secara jelas konsep Khittah ini telah diterbitkan oleh PBNU dalam bentuk buku saku, dengan judul: **Khittah Nahdlatul Ulama, Seri 02/11/85.**

Dari penegasan diatas, maka yang menjadi visi dari uraian dalam skripsi ini adalah, bagaimana pasang-surut sejarah NU dengan berbagai konsekuensinya dalam kurun waktu tahun 1984-1995. Dan untuk lebih mendalamnya, dapat dilihat pada bab selanjutnya.

D. RUMUSAN MASALAH

Agar dapat terbatasnya bahasan dalam tulisan ini, maka sengaja penyusun cukupkan pada beberapa rumusan masalah yang nantinya akan memuarakan pokok-pokok bahasan tulisan ini pada rumusan yang telah ada.

Sedangkan rumusan tersebut adalah,

01. Bagaimana dinamika NU dalam implementasi keputusan untuk kembali ke Khittah 1926 ? kearah mana dinamika itu berjalan ?
02. Bagaimana model kepolitikan NU berkaitan dengan implementasi di atas ?

E. METHODOLOGI

1. Tujuan, lingkup Penelitian dan Level Analisanya

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menggambarkan dinamika NU setelah memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926. dalam tujuan ini telah terlihat pula jangkauan penelitian dan level analisanya. Lingkup penelitian dimulai sejak 1984, sampai tahun 1995

--walaupun pada bagian awalnya juga akan dilakukan kilas-balik sejarah NU sejak berdirinya. Pada tahun 1984 lahir keputusan kembali ke khittah, sedangkan tahun 1995 adalah batas kemungkinan penelitian ini dapat dilakukan. Level analisisnya adalah kelompok. Kelompok di sini terutama dimaksudkan pada kalangan elit NU sebagai penentu dinamika internal dan eksternal NU.

2. *Methode Penelitian*

Dengan tujuan di atas, metode yang digunakan di sini adalah metode deskriptif-historis. Penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan/menjabarkan suatu gejala. Di dalamnya, penyusun mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tapi tidak melakukan pengajuan hipotesa.²⁶ Artinya, tidak perlu adanya pemunculan hipotesa di sini.

Metode deskriptif, yang dalam penelitian ini dioperasionalisasikan dalam studi kualitatif, mempunyai karakter utama, yaitu:

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada

²⁶Masri Singarimbun, **Metode dan Proses Penelitian**, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (eds.), **Metode Penelitian Survey**, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 4-5.

pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis (karena itu metode ini seringkali disebut pula sebagai metode analitis).²⁷

Sebuah deskripsi pada dasarnya adalah suatu representasi objektif tentang fenomena yang diamati. Namun dalam kenyataannya, pengamatan itu tidak dapat lepas dari segi-segi subjektif. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti di sini adalah agar dapat mengawasi diri untuk tidak bertindak terlalu subjektif, dalam arti bahwa ia tidak mencampur-baurkan pendapatnya dengan kenyataan-kenyataan fenomena dalam pola maupun dalam materi deskripsi.²⁸

Sedangkan metode historis, menurut Nawawi,²⁹ dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas dalam kurun waktu tertentu di masa lalu.
2. Menggambarkan gejala sebab suatu keadaan atau kejadian masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu itu

²⁷Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research (Bandung: CV Tarsito, 1975), h. 132.

²⁸I b i d., h. 133.

²⁹Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: GMUP, 1983), h. 79.

dipergunakan sebagai informasi untuk memperjelas keadaan atau kejadian masa sekarang sebagai suatu rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu sama lain.

Studi ini mengutamakan pemakaian cara kedua. Bahwa setiap peristiwa sosial memiliki akar-akar sejarah sosial yang luas serta implikasi terhadap masa depan, adalah pertimbangan penting penggunaan metode historis dalam pola ini. Karenanya, salah satu cara untuk menjelaskan fenomena NU ini adalah dengan melihat kembali sejarahnya sejak awal. Misalnya hakekat dan latar belakang kelahiran organisasi ini, juga perjalanan sejarahnya yang telah mematangkan karakteristik tertentu dalam perilakunya, termasuk perilaku politiknya.

3. Jenis Data yang Dibutuhkan dan Teknik Akumulasinya

Studi persoalan yang kerap muncul dalam penelitian adalah berkaitan dengan validitas dan reliabilitas alat pengukuran yang digunakan. Masalahnya, setiap argumen, kesimpulan, bahkan teori dalam ilmu sosial sangat bersifat tentatif dan tidak terdapat kepastian aksiomatis 'satu tambah satu adalah dua' sebagaimana dalam ilmu eksakta. Disamping itu, setiap fenomena sosial pada umumnya memiliki hubungan saling-berkait yang luas dengan begitu banyak fenomena sosial lainnya, sehingga tidak mudah untuk begitu saja menyekat fenomena-fenomena itu dan menentukan suatu

alat pengukuran tertentu untuk masing-masingnya.

Validitas menunjuk sejauh mana suatu alat pengukur itu dapat mengukur apa yang ingin diukur. Pengukuran yang valid untuk berat badan, misalnya, adalah timbangan, sedangkan untuk panjang adalah meteran, dan seterusnya. Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih.³⁰ Misalnya, mengukur panjang dengan meteran pasti lebih reliabel jika dibandingkan dengan menggunakan jengkal tangan. Meteran hampir pasti menjamin hasil yang sama untuk pengukuran pertama, kedua, dan seterusnya, pada benda yang sama. Sedang jengkal tangan sangat mungkin berubah. Contoh-contoh ini, sekalipun sederhana adalah fenomena eksakta. Dalam ilmu sosial, aplikasinya tidaklah sesederhana itu.

Dalam penelitian historis, validitas dan reliabilitas hasil dan kesimpulan yang dicapai sangat ditentukan oleh sifat data yang ditentukan pula oleh sumber datanya. Untuk itu, sifat data historis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkap.

³⁰Djamiludin Ancok, Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian, dalam Singarimbun dan Effendi (eds.), *Op. Cit.*, h. 122f.

Secara sederhana data ini juga disebut sebagai data asli.

2. Data sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan demikian data ini disebut juga data tidak asli.³¹

Kedua jenis data tersebut untuk penelitian ini. Akumulasinya dilakukan dengan teknik-teknik dokumentasi dan interview. Teknik dokumentasi terutama dimaksud pada telaah kepustakaan, baik berupa buku, artikel di majalah atau surat kabar, dan sebagainya, yang memenuhi kriteria relevansi terhadap objek penelitian ini. Dalam teknik ini tercakup baik data primer maupun data sekunder. Beberapa tokoh NU telah banyak membuahkan karya tulis mereka, baik yang secara langsung menulis seputar NU, maupun yang tidak, namun di dalamnya tersirat "cara pandang NU". Abdurrahman Wahid misalnya, sangat produktif dalam hal ini. Karya-karya penulis lain, sebagai data sekunder, sudah barang tentu tidak kalah pentingnya bagi penelitian ini. Seperti misalnya karya-karya objektif para ilmuan dan pengamat 'di luar pagar' yang sangat membantu penulisan ini memperoleh kacamata pengamatan yang paling tepat bagi analisa terhadap terhadap setiap hasil dalam akumulasi data yang dilakukan.

³¹Newawi, Op. Cit., h. 80.

Penelusuran kepustakaan ini, baik buku-buku maupun majalah dan surat-kabar terbitan tahun lampau, dilakukan di berbagai perpustakaan di Surabaya, Sidoarjo dan kota-kota lain, baik di tingkat perguruan tinggi dan berbagai tempat lainnya.

Pengumpulan data dalam metode dokumentasi ini selanjutnya juga memberi pola bagi wawancara (interview) yang menjadi metode selanjutnya. Ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara dapat dibedakan atas:

1. Wawancara bebas (*unguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, namun tetap mengingat akan data yang hendak dikumpulkan.
2. Wawancara terpimpin (*guided interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci.
3. Wawancara bebas-terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Di sini, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.³²

Dalam penelitian ini dipergunakan cara ketiga. Sebab ternyata dalam wawancara yang dilakukan ditemukan beberapa hal baru yang dapat segera dikupas lebih jauh dengan

³²Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 127f.

wawancara yang dilakukan secara bebas-terpimpin yang tidak terpaku pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dirinci sebelumnya.

4. Teknik Analisa Data

Pengumpulan data ini sekaligus menjadi langkah terawal dalam proses analisa data. Mengacu pada Nawawi³³ dalam penelitian historis terdapat tiga proses yang harus dilakukan. Pertama adalah pengumpulan data di atas.

Proses kedua adalah melakukan kritik terhadap data yang tersedia untuk menjamin keaslian data tersebut. Kritik itu meliputi kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber data agar memperoleh keyakinan bahwa penelitian telah dilakukan dengan menggunakan data yang tepat. Kritik internal bertujuan untuk meneliti tentang kebenaran isi data dari sumber yang bersangkutan.

Proses ketiga adalah penyusunan hasil penelitian yang bersifat historis yang antara lain mengenai pengorganisasian materi, peletakan dasar pandang dari sudut masa lalu, identifikasi masalah yang bernilai historis, ketelitian penulisan, pemakaian proses berpikir analisa sintesis, serta proses deduksi dan induksi yang tepat.

³³Nawawi, Op. Cit., h. 80-81.

Muara proses ini adalah pada penarikan kesimpulan, sebagai tahap paling akhir dalam teknik analisa data.

F. SISTEMATIKA

Secara keseluruhan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Sebelum menganalisa perjalanan NU sampai kurun waktu tahun 1995 dalam tinjauan Khittah 1926 yang merupakan inti dari skripsi ini, BAB II akan memberikan gambaran tentang profil NU, baik profil kesejarahan maupun profil keorganisasiannya. Dalam tinjauan sejarah NU sebelum tahun 1984, dapat ditemui karakteristik mendasar organisasi ini yang turut memberi warna pada perjalanannya kemudian.

Bab III akan mulai melihat implementasi keputusan kembali ke khittah 1926 dalam dinamika internalnya. Di sini akan dilihat perjalanan dan ujian terhadap khittah selama kurun waktu sepuluh tahun, kesulitan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan konsekuensi organisatoris internal khittah berupa pengembalian otoritas ulama, serta persepsi warga dan elit NU terhadap khittah itu.

Sementara implementasi khittah dalam dinamika eksternalnya akan diuraikan dalam Bab IV. Di sini akan diajukan argumentasi bahwa kembali ke khittah tidak pernah dimaksudkan untuk menghapus sama sekali dimensi politik dalam gerakan NU. Khittah hanya mengamanatkan sebuah reorientasi peran politik NU. Akan dilihat pula bagaimana

posisi NU, atau persisnya warga NU, dalam dua pemilu, 1987 dan 1992, serta bidang-bidang garapan NU setelah tidak lagi terkonsentrasi pada kepolitikan praktis.

Setelah Bab IV mencoba untuk memprediksikan prospek NU, maka pada Bab V akan kembali melihat pembahasan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan merumuskan beberapa persoalan yang tidak terjawab.